

Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia
Juli-Desember 2005, Vol. 2, No. 2, pp.49-72

MANAJEMEN LABA DAN STATUS KETERLAMBATAN PERUSAHAAN DALAM MENYAMPAIKAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Ika Permatasari

Ika Permatasari adalah staf pengajar Departemen Akuntansi FEUI

Abstract

The purpose of this study is to evaluate whether companies who are behind schedule in submitting their financial statement to Bapepam tend to do more earnings management than those who are on time. This study also evaluates other factors of earnings management, such as leverage, firm size, availability of audit committee and independent board, and audit quality.

Using the proxy of discretionary accruals as the indicator of earnings management, this study finds that behind-schedule companies show higher average of discretionary accruals than on-time companies. Statistics also show that financial indicators for these companies are significantly different.

Further, this study finds that leverage has a negative relation with discretionary accruals while firm size has a positive relation with it. This study also finds that companies in compliance to Bapepam regulation about audit committee have lower average of discretionary accruals than those not complying to Bapepam regulation and/or without audit committee. Finally, this study finds that big-4-audited companies have lower average of discretionary accruals than other companies. This study, however, does not provide any empirical evidence to support any relation between the proportions of independent board to discretionary accrual level.

Keywords : *financial statements, earning management, discretionary accruals*

**PERPUSTAKAAN PUSAT
UNIVERSITAS INDONESIA**

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan keuangan merupakan unsur penting yang dibutuhkan oleh pemakai (*user*) sebagai informasi dalam pengambilan keputusan investasi dan pemberian kredit. Laba merupakan informasi akuntansi untuk memuaskan kebutuhan publik. Laba tersebut memiliki kandungan informasi yang penting karena digunakan oleh manajemen untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja dan prospek perusahaan di masa yang akan datang. Karena pentingnya informasi laba yang terkandung dalam laporan keuangan tersebut, ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan, khususnya bagi perusahaan publik, akan mempengaruhi penilaian pemakai laporan keuangan terhadap perusahaan yang bersangkutan.

Dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, terdapat karakteristik kualitatif yang membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang berguna bagi pemakai adalah memenuhi salah satu karakteristik utama yaitu relevan dalam proses pengambilan keputusan. Karakteristik utama lainnya adalah dapat diandalkan, yaitu bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan.

Agar laporan keuangan itu relevan, maka harus memenuhi kriteria tepat waktu, artinya informasi tersebut tersedia pada saat yang dibutuhkan untuk mengambil keputusan. Jika terdapat keterlambatan dalam pelaporan, maka informasi kinerja yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya.

Atas dasar pentingnya ketepatan waktu dalam pelaporan keuangan, setiap perusahaan publik atau yang mencatatkan sahamnya di bursa efek, berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan perusahaan kepada otoritas bursa secara berkala. Hal ini sesuai dengan peraturan Bapepam yaitu Peraturan Nomor X.K.2 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala tanggal 17 Januari 1996.

Peraturan Nomor X.K.2 tahun 1996 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala mengharuskan perusahaan menyampaikan laporan keuangan tahunan selambat-lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal tahun buku berakhir. Peraturan tersebut diubah dengan Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-17/PM/2002 tanggal 14 Agustus 2002, dimana laporan keuangan tahunan tersebut harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan.

¹ Kompas, Laporan Keuangan, Senin, 14 April 2003.

Dalam realisasinya, masih banyak perusahaan publik yang mengalami keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan tahunannya kepada Bapepam. Kesadaran emiten yang mencatatkan saham maupun obligasinya di Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan/atau di Bursa Efek Surabaya (BES) dinilai masih rendah dalam hal penyampaian laporan keuangan tahunan. Menurut catatan BEJ, dari 300-an emiten terdapat 86 emiten yang tidak dapat memenuhi batas akhir penyampaian laporan keuangan audit tahun 2002, yaitu 31 Maret 2003.¹ Sedangkan untuk laporan keuangan tahun 2003, BEJ memberikan teguran kepada 81 emiten yang terlambat menyerahkan laporan keuangan auditan 2003.²

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 dan peraturan Bapepam, perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dari waktu yang telah ditentukan dikenakan sanksi administratif. Sanksi-sanksi tersebut berupa: peringatan tertulis, denda yaitu kewajiban membayar sejumlah uang tertentu, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, pembatalan persetujuan, dan pembatalan pendaftaran.

Penelitian terdahulu membuktikan bahwa pengumuman laba lebih awal dari ekspektasi waktu terkait dengan berita baik dan bahwa penundaan pengumuman laba terkait dengan antisipasi pasar terhadap berita buruk. Misalnya, Dyer dan McHugh (1975) melakukan penelitian untuk menemukan alasan-alasan penundaan publikasi laporan keuangan perusahaan-perusahaan Australia. Hasil penelitiannya mendukung hipotesis bahwa terdapat hubungan negatif yang signifikan antara waktu keterlambatan dengan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba.

Mansyur (2002) menguji faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan dan menemukan bahwa profitabilitas dan opini audit memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan. Sedangkan *debt to equity ratio*, kepemilikan oleh pemegang saham aktif dan pasif serta ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan.

Chung *et al.* (2003) menguji motivasi dan reaksi pasar saham dari perusahaan yang mengumumkan laba di Wall Street Journal (WSJ) setelah menyerahkannya ke Security Exchange Commission (SEC). Praktik yang umum dilakukan adalah perusahaan mengumumkan labanya terlebih dahulu di WSJ sebelum diserahkan ke SEC. Perusahaan yang mengumumkan laba di WSJ setelah SEC *filing* secara sengaja menunda pengumuman labanya ke publik. Perusahaan tersebut memiliki *return on assets* yang lebih rendah dan rasio *leverage* yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang melakukan pelaporan sesuai fenomena umum. Selain itu, perusahaan tersebut mengalami laba kuartalan dan arus kas operasi yang buruk. Penelitian ini menemukan bukti bahwa perusahaan-perusahaan tersebut tidak hanya memiliki kondisi keuangan yang buruk tetapi juga melakukan manajemen laba dengan membukukan akrual yang meningkatkan laba.

² Koran Tempo, *BEJ Sedang Proses Delisting Empat Perusahaan*, Jum'at, 09 Juli 2004.

B. PERUMUSAN MASALAH

Masalah yang menjadi obyek penelitian ini adalah:

- (1) Apakah perusahaan-perusahaan publik yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan dari waktu yang ditentukan oleh Bapepam selaku otoritas bursa melakukan manajemen laba lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat.
- (2) Faktor-faktor apa saja yang memotivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba tersebut.

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris yang menunjukkan apakah manajemen laba oleh perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat. Selain tujuan tersebut, penelitian ini juga berusaha untuk menguji faktor-faktor lain yang bersama-sama mempengaruhi manajemen laba pada perusahaan yang terlambat maupun tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya. Faktor-faktor lain yang diuji dalam studi ini adalah skala usaha perusahaan, tingkat hutang perusahaan, komite audit, komisaris independen, dan kualitas audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP).

Faktor skala usaha dan tingkat hutang perusahaan dipilih untuk menunjukkan motif perilaku oportunistik yang dikemukakan oleh Watts dan Zimmerman (1990) yaitu hipotesis politik dan kontrak hutang. Faktor komite audit dan komisaris independen dipilih untuk menunjukkan mekanisme monitoring terutama dalam peranannya mengendalikan tingkat manajemen laba. Sedangkan faktor kualitas audit dipilih karena auditor memainkan peran penting dalam meningkatkan kredibilitas pelaporan keuangan perusahaan.

II. LANDASAN TEORI

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai “sebuah kontrak dimana satu atau lebih prinsipal menggunakan pihak lain (agen) untuk melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan prinsipal yang mencakup pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen”. Dalam kontrak antara manajer-pemegang saham, manajer dianggap sebagai agen dan pemegang saham sebagai prinsipal.

Masalah keagenan muncul akibat agen tidak memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Sebagai contoh, agen dalam hal ini manajer memiliki insentif untuk meningkatkan kesejahtraannya sendiri dengan menggunakan fasilitas yang dipercayakan oleh pemegang saham atau dana yang diperoleh dari pemberi pinjaman.

Upaya untuk mengatasi atau mengurangi masalah keagenan ini akan menimbulkan biaya keagenan. Menurut Jensen dan Meckling (1976) biaya keagenan ini terdiri dari:

(1) *monitoring cost*, yaitu biaya yang timbul dan ditanggung oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen. Biaya ini dikeluarkan untuk mengurangi tindakan agen yang akan merugikan kepentingan prinsipal. Contoh biaya ini adalah biaya audit dan biaya untuk menetapkan rencana kompensasi manajer, pembatasan anggaran, dan aturan-aturan operasi; (2) *bonding cost*, yaitu biaya yang ditanggung oleh agen, dengan beban prinsipal (yaitu laba menurun), untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Contoh misalnya biaya yang dikeluarkan oleh manajer untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemegang saham; (3) *residual loss*, timbul dari kenyataan bahwa tindakan agen kadangkala berbeda dari tindakan yang memaksimalkan kepentingan prinsipal. Misalnya agen tidak memecat rekan kerjanya yang melakukan pekerjaan buruk.

Hubungan keagenan antara berbagai pihak (perusahaan dengan manajer, pemasok, pelanggan, kreditur, dan pemerintah) banyak ditentukan berdasarkan angka-angka akuntansi. Angka-angka akuntansi digunakan dalam kontrak perusahaan untuk mengurangi biaya keagenan. Rasio-rasio seperti *debt-to-equity ratio* digunakan dalam kontrak hutang untuk membatasi tindakan manajer yang dapat merugikan kreditur. Laba akuntansi digunakan dalam rencana bonus untuk mengurangi kelalaian manajer.

Penelitian teori akuntansi positif (*positive accounting theory*—PAT) dimaksudkan untuk menguji hipotesis-hipotesis teori agensi yang akan mendorong pemilihan metode akuntansi oleh manajer perusahaan. Dalam pengertian PAT, manajemen akan memilih kebijakan akuntansi yang dapat meminimumkan seluruh biaya kontrak (*efficient contracting*). Misalnya, manajer memilih kebijakan akuntansi yang akan menjaga perusahaan agar memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan dalam perjanjian hutang untuk menghindari adanya pelanggaran hutang yang menyebabkan biaya kebangkrutan atau biaya renegosiasi hutang dan bunga dengan pihak bank. PAT juga menyatakan bahwa dengan adanya berbagai pilihan kebijakan akuntansi, manajemen akan memilih kebijakan yang menguntungkan dirinya, yang disebut dengan perilaku oportunistik (*opportunistic behaviour*), misalnya akibat bonus atau kompensasi yang diberikan kepada manajemen yang didasarkan atas laba yang dicapai. Ada 3 (tiga) hipotesis yang dikemukakan oleh PAT diformulasikan oleh Watts and Zimmerman (1986), yaitu hipotesis rencana bonus, kontrak hutang dan biaya politik.

Manajemen laba diduga muncul atau dilakukan oleh manajer dalam pelaporan keuangan suatu organisasi karena mereka mengharapkan suatu manfaat dari tindakan yang dilakukan. Manajemen laba menarik untuk diteliti karena dapat memberikan gambaran akan perilaku manajer dalam melaporkan kegiatan usahanya pada suatu periode tertentu, yaitu adanya kemungkinan munculnya motivasi tertentu yang mendorong mereka untuk mengatur data keuangan yang dilaporkan (Gurnanti 2000). Perlu ditekankan disini bahwa manajemen laba tidak harus dikaitkan dengan upaya untuk memanipulasi data atau informasi

akuntansi, tetapi lebih cenderung dikaitkan dengan pemilihan metode akuntansi untuk mengatur laba yang masih diperkenankan oleh standar akuntansi yang berlaku umum. Menurut Paul M. Healy dan James M. Wahlen, manajemen laba terjadi ketika manajer menggunakan keuangan dengan tujuan baik untuk menyesatkan *stakeholder* mengenai kinerja perusahaan atau untuk mempengaruhi hasil kontrak yang bergantung pada angka-angka yang dilaporkan.³

Kebijakan akrual yang menyebabkan manajemen laba dapat dilakukan akibat perusahaan mencatat transaksi berbasis pencatatan akrual. Dalam pencatatan akrual digunakan prosedur alokasi yang bertujuan untuk menyesuaikan beban dan pendapatan dengan periodenya, bukan mengkaitkan beban dan pendapatan berdasarkan atas pengeluaran dan penerimaan kas. Oleh karena itu, kebijakan akrual yang diperbolehkan dalam penerapan standar akuntansi dapat dimanfaatkan untuk melakukan manajemen laba. Jika manajemen melakukan hal-hal tersebut karena adanya niat, bukan karena kondisi perusahaan yang menghendaki perubahan *judgement* dan metode akuntansi serta penggeseran biaya dan pendapatan, maka hal ini disebut kebijakan akrual (*discretionary accruals*). Kebijakan akrual yang disebabkan oleh tuntutan kondisi perusahaan, seperti peningkatan pendapatan perusahaan, sehingga dibutuhkan penyesuaian terhadap estimasi tingkat piutang tidak tertagih, perbaikan terhadap peralatan pabrik dengan penyesuaian kembali estimasi umur peralatan pabrik, disebut *non-discretionary accruals*. Jadi, total akrual terdiri dari dua komponen, yaitu *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*.

Terkait dengan motivasi penundaan pengumuman laba, Chung *et al.* (2003) menguji perusahaan-perusahaan yang mengumumkan laba di Wall Street Journal (WSJ) setelah SEC *filing*. Umumnya, perusahaan mengumumkan laba di WSJ sebelum SEC *filing*. Terdapat kasus unik bahwa perusahaan yang mengumumkan laba di WSJ setelah SEC *filing* dengan sengaja menunda pengumuman labanya ke publik. Perusahaan ini memiliki *return on asset* lebih rendah dan rasio tingkat hutang lebih tinggi daripada perusahaan pembanding, yaitu yang melakukan pengumuman laba sesuai fenomena umum. Lebih lanjut, perusahaan yang mengumumkan laba di WSJ setelah SEC *filing* mengalami laba kuartalan dan arus kas operasi yang buruk.

Chung *et al.* (2003) menemukan bahwa perusahaan yang mengumumkan laba di WSJ setelah SEC *filing* tidak hanya memiliki kinerja keuangan yang buruk tetapi juga melakukan manajemen laba. Mereka menunda pengumuman WSJ untuk menanggukkan berita buruk, konsisten dengan Bowen *et al.* (1992); Patell dan Wolfson (1982); dan Trueman (1990). Lebih lanjut, perusahaan yang membalik urutan tersebut melakukan manajemen laba dengan membukukan *income increasing accruals* yang signifikan.

³ Healy, Paul M. and James M. Wahlen, *A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting*, Accounting Horizons Vol. 13 No.4, December 1999, pp. 365-383

Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan akrual yang meningkatkan laba oleh perusahaan yang sengaja menunda pengumuman labanya ke publik adalah tinggi.

III. HIPOTESIS PENELITIAN

Bursa Efek Jakarta mengenakan sanksi kepada emiten yang memiliki masalah dalam kinerja dan penyampaian laporan keuangan mulai berupa denda, suspensi saham, sampai dengan penghapusan pencatatan saham (*delisting*). Selama tahun 2003, BEJ memberikan teguran pertama sebanyak 81 emiten dan teguran kedua sebanyak 12 emiten yang terlambat menyampaikan laporan keuangan 2002. Sementara itu, 6 emiten dihentikan sementara transaksi perdagangan sahamnya⁴.

Upaya untuk memenuhi ketentuan maupun menghindari sanksi yang dikeluarkan oleh otoritas pasar modal memberikan motivasi bagi manajer perusahaan untuk melakukan manajemen laba. Dechow *et al.* (1996) membuktikan bahwa perusahaan yang terkena sanksi dari *Stock Exchange Commission* (SEC) memiliki *discretionary accruals* lebih tinggi dari perusahaan yang tidak terkena sanksi. Chung *et al.* (2003) membuktikan bahwa perusahaan yang sengaja terlambat mengumumkan laba dengan membalik urutan pengumuman laba (SEC *filing* baru kemudian WSJ) membukukan *income-increasing accruals* yang signifikan, dimana perusahaan ini memiliki performa keuangan yang buruk. Berdasarkan fenomena tersebut, hipotesis alternatif yang diajukan adalah:

H₁₁: *Ceteris paribus*, rata-rata *discretionary accruals* perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat.

Literatur manajemen laba menunjukkan bukti bahwa manajer melakukan *income-increasing accruals* untuk menghindari pelanggaran batasan hutang (DeFond dan Jiambalvo, 1994; Sweeney, 1994). Atau dapat terjadi sebaliknya, dimana perusahaan yang mengalami tekanan keuangan kemungkinan melakukan *income-decreasing accruals* agar dapat melakukan renegosiasi kontrak utang (DeAngelo *et al.*, 1994). Hipotesis yang diajukan adalah:

H₂₂: *Ceteris paribus*, tingkat hutang berpengaruh terhadap *discretionary accruals*.

Terdapat dua pandangan yang bertentangan mengenai hubungan antara manajemen laba dan ukuran perusahaan. Pertama, semakin besar ukuran perusahaan, manajemen laba semakin berkurang. Alasannya, ukuran perusahaan terkait dengan sistem pengendalian

⁴ www.tempointeraktif.com BEJ Sedang Proses Delisting Empat Perusahaan diakses pada 25 Januari 2005.

internal. Perusahaan besar memiliki sistem pengendalian internal yang kompleks dan memiliki auditor internal yang lebih kompeten dibandingkan perusahaan kecil. Selain itu, sistem tata kelola perusahaan (*corporate governance*) mengurangi tingkat manajemen laba dan meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (Warfield *et al* 1995; dan Beasley *et al* 2000) dalam Kim *et al.* (2003). Pandangan lain yang bertentangan menyatakan bahwa perusahaan besar cenderung mengatur laba dibandingkan perusahaan kecil. Nelson *et al.* (2002) menunjukkan bahwa auditor cenderung melonggarkan perusahaan besar yang melakukan manajemen laba. Berdasarkan argumen di atas, hipotesis kedua terkait dengan ukuran perusahaan yang diajukan adalah sebagai berikut:

H₃: *Ceteris paribus*, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *discretionary accruals*.

Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) dalam surat edaran tentang Komite Audit (Surat Edaran Nomor: SE-03/PM/2000) menentukan bahwa Komite Audit beranggotakan sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang anggota dan salah satu dari anggota tersebut merupakan Komisaris Independen, sedangkan anggota lainnya merupakan pihak ekstem yang independen. Berikutnya, anggota komite audit yang berasal dari komisaris perusahaan bertindak sebagai Ketua Komite Audit. Berdasarkan ketentuan dari Bapepam tersebut, penulis menguji pengaruh dari Komite Audit yang sesuai dengan ketentuan Bapepam terhadap manajemen laba.

Komite Audit sebagai syarat penting *corporate governance* diharapkan dapat menghambat aktivitas manajemen laba. Chtourou *et al.* (2001) menemukan bahwa komite audit memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Dengan demikian, hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

H₄: *Ceteris paribus*, rata-rata *discretionary accruals* perusahaan dengan Komite Audit yang sesuai dengan ketentuan Bapepam lebih kecil daripada perusahaan yang tidak memiliki Komite Audit atau memiliki Komite Audit tetapi tidak sesuai ketentuan.

Bursa Efek Jakarta mengeluarkan Peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas Di Bursa yang salah satu butirnya terkait dengan penyelenggaraan *good corporate governance*, yaitu Komisaris Independen. Berdasarkan ketentuan tersebut, Komisaris Independen berjumlah sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Chtourou *et al.* (2001) menemukan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap *discretionary accruals*. Hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

H₅: *Ceteris paribus*, proporsi Komisaris Independen dari jumlah seluruh anggota komisaris berpengaruh negatif terhadap *discretionary accruals*.

Kualitas audit memiliki hubungan dengan ukuran KAP (DeAngelo 1981). Ukuran KAP diproksi dengan Big 5 (KAP besar) dan Non Big 5 (KAP kecil). Auditor Big 5 memberikan jasa audit yang berkualitas tinggi. Perusahaan yang diaudit oleh auditor Big 5 cenderung menunjukkan tingkat *discretionary accruals* yang lebih rendah (Becker *et al.* 1998; Francis *et al.* 1999; Payne dan Robb 2000) dalam Kim *et al.* (2003). Hipotesis yang dibentuk adalah sebagai berikut:

H₁₆: *Ceteris paribus*, rata-rata *discretionary accruals* perusahaan yang diaudit oleh Big 5 lebih kecil daripada perusahaan yang diaudit oleh Non-Big 5. Non-Big 5.

IV. PEMILIHAN SAMPEL

Penelitian ini menggunakan populasi perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Penulis menentukan target populasi adalah perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Jakarta periode 2002 sampai dengan 2003. Periode tersebut diambil sebagai batas waktu mengingat terdapat variabel *corporate governance* yaitu komisaris independen dan komite audit yang baru efektif dipenuhi perusahaan mulai tahun 2002. Pada pertengahan tahun 2000, Bapepam dan BEJ mengeluarkan ketentuan tentang komisaris independen dan komite audit. Pada tahun 2001 masih banyak perusahaan yang belum memenuhi ketentuan tersebut dan baru efektif tahun 2002.

Alasan lain yang mendasari pengambilan tahun penelitian pada rentang waktu tersebut adalah perubahan peraturan Bapepam mengenai perubahan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan. Tahun 2001 dan tahun-tahun sebelumnya, perusahaan diwajibkan menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 120 (seratus dua puluh) hari setelah tahun buku berakhir. Mulai tahun 2002, Bapepam mewajibkan perusahaan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tahun buku berakhir.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berasal dari laporan keuangan yang telah diaudit oleh kantor akuntan independen, *Indonesian Capital Market Directory*, situs BEJ (www.jsx.co.id), perpustakaan Bapepam, perpustakaan BEJ, dan berbagai sumber lainnya.

Penelitian ini menggunakan sampel berdasarkan *purposive sampling*. Perusahaan-perusahaan yang menjadi sampel dalam penelitian ini dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria-kriteria tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan yang diambil tidak termasuk kategori perusahaan perbankan, asuransi, *credit agency*, sekuritas dan telekomunikasi karena penyajian laporan keuangan berbeda dengan laporan keuangan pada umumnya. Perusahaan-perusahaan ini memiliki laporan keuangan yang sangat terpengaruh oleh faktor regulasi.

2. Terdaftar di BEJ sebelum 31 Desember 2001 agar tersedia data untuk menghitung akrual.
3. Perusahaan yang dipilih memiliki semua data yang diperlukan dalam penelitian.
4. Perusahaan yang dipilih menerbitkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode pengamatan, yaitu tahun 2002 sampai dengan 2003.

Sampel yang diambil dari perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Jakarta tersebut diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar yaitu kelompok industri manufaktur dan non manufaktur. Alasan penulis membagi sampel menjadi dua kelompok tersebut karena terdapat perbedaan karakteristik antara manufaktur dan non manufaktur. Sampel yang dibagi dalam dua kelompok industri tersebut digunakan untuk mencari nilai *discretionary accruals* menggunakan model modifikasi Jones, sedangkan untuk pengujian *discretionary accruals*, sampel dalam kedua kelompok tersebut digabungkan. Hasil pemilihan sampel terlihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Hasil Pemilihan Sampel

	Non Manufaktur		Manufaktur	
	2002	2003	2002	2003
Perusahaan Terlambat	19	17	32	50
Perusahaan Tidak Terlambat	56	58	83	65
Jumlah Sampel	75	75	115	115

V. MODEL PENELITIAN

A. MODEL MODIFIKASI JONES

Penelitian sebelumnya (misalnya Jones 1991; Cahan 1992) menunjukkan bahwa total akrual mencakup komponen *discretionary accruals* dan *non-discretionary accruals*. Komponen *non-discretionary accruals* terkait dengan perubahan tingkat aktivitas dan skala aktiva tetap sehingga bukan merupakan sasaran diskresi manajemen. Penelitian ini menggunakan model modifikasi Jones sebagaimana digunakan dalam penelitian sebelumnya untuk mengestimasi komponen *discretionary accruals* yang menjadi sasaran *management discretion* melalui pilihan estimasi dan metode akuntansi.

Dechow, Sloan dan Sweeney (1995) menyatakan bahwa modifikasi model Jones (1991) merupakan model yang paling kuat dalam mendeteksi manajemen laba secara relatif terhadap model Healy, model DeAngelo, dan model Jones orisinal. Modifikasi model Jones merupakan model yang paling tepat untuk memisahkan kebijakan akrual oleh manajemen dengan akrual yang terjadi akibat perubahan skala ekonomi perusahaan.

Model modifikasi Jones adalah sebagai berikut:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = a_i \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + b_{1i} \left(\frac{\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + b_{2i} \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) + \varepsilon_{it}$$

dimana,

- TA_{it} : total akrual perusahaan i pada periode t
 ΔRev_{it} : pendapatan perusahaan i pada periode t dikurangi pendapatan periode t-1
 ΔRec_{it} : piutang dagang perusahaan i periode t dikurangi piutang dagang periode t-1
 PPE_{it} : aktiva tetap (gross) perusahaan i pada periode t
 A_{it-1} : total aktiva perusahaan i pada periode t-1
 ε_{it} : nilai residu perusahaan i pada periode t

Total akrual untuk periode t dapat dinyatakan dalam persamaan berikut:

$$TA_{it} = NI_{it} - CFO_{it}$$

dimana,

- TA_{it} : total akrual perusahaan i pada periode t
 NI_{it} : laba bersih perusahaan i pada periode t
 OCF_{it} : arus kas dari kegiatan operasi perusahaan i pada periode tt

Setelah melakukan regresi model di atas, *discretionary accruals* yang dilakukan oleh setiap perusahaan dihitung dengan persamaan sebagai berikut:

$$\frac{DA_{it}}{A_{it-1}} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - \left[a_i \left(\frac{1}{A_{it-1}} \right) + b_{1i} \left(\frac{\Delta Rev_{it} - \Delta Rec_{it}}{A_{it-1}} \right) + b_{2i} \left(\frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right) \right]$$

dimana,

- DA_{it} : *discretionary accruals* perusahaan i pada periode t.

B. PENGUJIAN DISCRETIONARY ACCRUALS

Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji apakah manajemen laba oleh perusahaan terlambat lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat, bersama-sama dengan faktor-faktor lain. Selanjutnya, apakah terdapat pengaruh faktor-faktor lainnya secara bersama-sama terhadap manajemen laba, yang diproksi dengan *discretionary accruals*. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$DA_{it} = \beta_0 + \beta_1 Status_{it} + \beta_2 Leverage_{it} + \beta_3 LnAsset_{it} + \beta_4 KOMAUD_{it} + \beta_5 KOMIND + \beta_7 Auditor_{it} + e_{it}$$

dimana,

DA_{it}	= estimasi <i>discretionary accruals</i> yang diskalakan dengan total aktiva periode t-1
$Status_{it}$	= 1 jika perusahaan terlambat, 0 jika perusahaan tidak terlambat
$LnAssets_{it}$	= logaritma natural atas total aktiva periode t-1
$Leverage_{it}$	= total hutang periode t dibagi dengan total aktiva periode t-1
$KOMAUD_{it}$	= 1 jika sesuai ketentuan Bapepam dan 0 jika lainnya
$KOMIND_{it}$	= prosentase komisaris independen dalam dewan komisaris periode t
$Auditor_{it}$	= 1 jika termasuk Big 5 dan 0 jika tidak termasuk Big 5
ϵ_i	= nilai residu perusahaan i pada periode t

VI. HASIL PENELITIAN

A. STATISTIK DESKRIPTIF

Pada tabel 2 disajikan statistik deskriptif masing-masing untuk perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan dan yang tidak terlambat. Rata-rata arus kas dari aktivitas operasi untuk perusahaan terlambat adalah Rp 51.555,9 juta lebih rendah Rp 87.821,4 juta dibandingkan rata-rata arus kas dari aktivitas operasi perusahaan yang tidak terlambat yaitu sebesar Rp 139.377,3 juta. Perbedaan rata-rata ini cukup signifikan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi 0,019. Rata-rata tingkat hutang yang ditunjukkan dengan *leverage* untuk perusahaan yang terlambat adalah 80,89% lebih tinggi 17,82% dibandingkan perusahaan yang tidak terlambat yaitu 63,07%. Perbedaan rata-rata *leverage* antara dua kelompok perusahaan tersebut cukup signifikan dengan nilai signifikansi 0,006. Rata-rata nilai ekuitas dan perubahan pendapatan untuk kedua kelompok tersebut berbeda secara signifikan. Rata-rata ekuitas perusahaan terlambat lebih rendah Rp 502.087,36 juta dibandingkan perusahaan yang tidak terlambat. Perbedaan ini memiliki nilai signifikansi 0,000 sedangkan rata-rata perubahan pendapatan perusahaan yang terlambat lebih kecil Rp 68.583,47 juta dibandingkan perusahaan yang tidak terlambat, dengan nilai signifikansi 0,061.

Rata-rata total akrual untuk kedua perusahaan tersebut berbeda secara signifikan dimana perusahaan terlambat rata-rata total akrualnya positif, yaitu 0,547% dari total aktiva, sedangkan perusahaan yang tidak terlambat memiliki rata-rata total akrual yang negatif, yaitu -1,49% dari total aktiva. Perbedaan rata-rata total akrual ini signifikan pada 0,10 dengan nilai signifikansi 0,082. Rata-rata *discretionary accruals* untuk kedua kelompok perusahaan juga berbeda secara signifikan dimana perusahaan terlambat memiliki rata-rata positif, yaitu 2,14% dari total aktiva, dan perusahaan yang tidak terlambat memiliki rata-rata negatif, yaitu 0,02% dari total aktiva, dengan nilai signifikansi 0,085.

Akan tetapi, rata-rata laba bersih, total aktiva, dan *return on asset* untuk kedua kelompok perusahaan ini nilainya tidak berbeda secara signifikan. Rata-rata total aktiva perusahaan terlambat adalah Rp 1,64 milyar sedangkan perusahaan tidak terlambat memiliki rata-rata Rp 1,63 milyar. Nilai rata-rata ini tidak berbeda secara signifikan. Rata-rata laba bersih perusahaan terlambat adalah Rp 137 juta dan untuk perusahaan tidak terlambat adalah Rp 129 juta. Lebih lanjut, rata-rata *return on asset* perusahaan terlambat adalah 3,9%, sedangkan perusahaan tidak terlambat adalah 5,08%. Rata-rata ROA perusahaan terlambat lebih rendah 1,18% daripada perusahaan yang tidak terlambat. Akan tetapi, perbedaan ini nilainya tidak signifikan. Secara keseluruhan, kinerja keuangan perusahaan terlambat lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terlambat.

Tabel 2: Statistik Deskriptif Perusahaan Terlambat

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NI*	-143.367,00	3.808.287,27	136.909,53	439.815,46
OCF*	-616.662,00	1.103.701,04	51.555,90	208.338,79
Assets*	20.070,94	15.130.837,00	1.643.456,09	2.532.012,01
ROA	-0,57982	0,46397	0,03911	0,14088
Leverage	0,01629	5,32884	0,80894	0,77451
Equity*	-7.651.068,00	3.513.177,85	107.364,72	994.194,08
dREV*	-778.727,54	1.725.655,25	16.048,22	283.331,73
TotAccrual	-0,56277	0,43133	0,00547	0,15099
DA	-0,57216	0,41575	0,02142	0,14976

Statistik Deskriptif Perusahaan Tidak Terlambat

	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
NI*	-1,145,956.86	4,421,583.00	128,937.04	449,960.23
OCF*	-684,103.35	4,201,839.00	139,377.35	432,751.16
Assets*	14,855.19	26,185,605.00	1,636,638.24	3,232,394.26
ROA	-0.81674	2.31825	0.05076	0.19581
Leverage	0.01979	4.74965	0.63074	0.574
Equity*	-8,797,096.26	14,322,722.00	609,452.08	1,801,589.30
dREV*	-3,476,420.02	2,968,634.00	84,631.69	459,865.75
TotAccrual	-1.46551	2.47862	-0.0149	0.22945
DA	-0.90318	2.45714	0.0002	0.21766
Valid N (listwise)				

*dalam juta rupiah

Test Statistics(a)

	NI	OCF	Assets	ROA	Leverage	Equity	dREV	TotAccrual	DA
Mann-Whitney U	14227	13127	14892	14694	12724	11529	13599	13734,5	13749
Wilcoxon W	21248	20148	49345	21715	47177	18550	20620	48187,5	48202
Z	-1,24	-2,353	-0,571	-0,772	-2,76	-3,966	-1,876	-1,74	-1,725
Asymp. Sig. (2-tailed)	0,214	.019**	0,568	0,44	.006**	.000**	.061***	.082***	.085***

a Grouping Variable: Status

**signifikan pada 0.05

***signifikan pada 0.10

B. PENGUJIAN *DISCRETIONARY ACCRUALS*

Sebelum melakukan pengujian *discretionary accruals*, dihitung terlebih dahulu nilai *discretionary accruals* setiap perusahaan menggunakan model modifikasi Jones, baik untuk sektor non manufaktur maupun non manufaktur.

Tabel 3: Model Modifikasi Jones Sektor Non Manufaktur

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	0.030	0.019		1.631	0.105		
dREV_dRE							
C	-0.114	0.017	-0.473	-6.537	0.000	0.990	1.010
PPE	-0.070	0.029	-0.173	-2.385	0.018	0.990	1.010

R-square = 0.237 F = 22.881
 Durbin Watson = 1.918 Sig = 0.000

Model Modifikasi Jones Sektor Manufaktur

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	0.047	0.032		1.457	0.147		
dREV_dRE							
C	-0.062	0.025	-0.163	-2.502	0.013	0.986	1.014
PPE	-0.082	0.042	-0.127	-1.941	0.053	0.986	1.014

R-square = 0.048 F = 5.666
 Durbin Watson = 1.962 Sig = 0.004

Hasil pengujian heteroskedastisitas adalah sebagai berikut:

Sektor Non Manufaktur:

Sum of Squares Residual I (SSR₁)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0.017	2	0.008	0.631	.536(a)
Residual	0.759	57	0.013		
Total	0.775	59			

Sum of Squares Residual II (SSR₂)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	1.839	2	0.92	59.667	.000(a)
Residual	0.879	57	0.015		
Total	2.718	59			

Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian homoskedastisitas sektor non manufaktur. Nilai *sum of squares residual I* adalah sebesar 0,759. Sedangkan nilai *sum of squares residual II* adalah sebesar 0,879. Nilai λ yang diperoleh dengan membagi *sum of squares residual I* dengan *sum of squares residual II* adalah sebesar 1,158.

Model dikatakan homoskedastik jika nilai $\lambda < F$ -tabel. Nilai F -tabel dengan $df_1 = 2$; $df_2 = 57$ dan $\alpha = 0,05$ adalah 3,15. Karena nilai $\lambda = 1,158$ lebih kecil dari nilai F -tabel = 3,15 maka hasil regresi model modifikasi Jones untuk sektor non manufaktur memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Sektor Manufaktur :

Sum of Squares Residual I (SSR₁)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	0.148	2	0.074	2.77	.068(a)
Residual	2.351	88	0.027		
Total	2.498	90			

Sum of Squares Residual II (SSR₂)

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1 Regressio	0.078	2	0.039	1.924	.152(a)
Residual	1.788	88	0.02		
Total	1.866	90			

$$\lambda = \frac{SSR_2}{SSR_1} = \frac{1,788}{2,351} = 0,761$$

Tabel di atas menunjukkan hasil pengujian homoskedastisitas sektor manufaktur. Nilai *sum of squares residual I* adalah sebesar 1,788. Sedangkan nilai *sum of squares*

residual II adalah sebesar 2,351. Nilai λ yang diperoleh dengan membagi *sum of squares residual I* dengan *sum of squares residual II* adalah sebesar 0,761.

Model dikatakan homoskedastik jika nilai $\lambda < F$ -tabel. Nilai F-tabel dengan $df_1 = 2$; $df_2 = 88$ dan $\alpha = 0,05$ adalah 3,07. Karena nilai $\lambda = 0,761$ lebih kecil dari nilai F-tabel = 3,07 maka hasil regresi model modifikasi Jones untuk sektor manufaktur memenuhi asumsi homoskedastisitas.

Berdasarkan pengujian model di atas, model modifikasi Jones sektor manufaktur maupun non manufaktur layak digunakan dalam pengujian. Dengan demikian, persamaan regresi model modifikasi Jones yang didapat adalah sebagai berikut:

Sektor non manufaktur:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = 0,030 - 0,114 \frac{(dRev - dRec)_{it}}{A_{it-1}} - 0,070 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} + \varepsilon_{it}$$

Sektor manufaktur:

$$\frac{TA_{it}}{A_{it-1}} = 0,047 - 0,062 \frac{(dRev - dRec)_{it}}{A_{it-1}} - 0,082 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} + \varepsilon_{it}$$

Pada model modifikasi Jones, baik sektor manufaktur maupun non manufaktur, koefisien variabel $(dRev-dRec)$ dan PPE memiliki nilai negatif. Artinya, semakin besar perubahan pendapatan dan aktiva tetap maka total akrual semakin kecil. Sedangkan variabel perubahan piutang usaha memiliki tanda negatif mengandung arti bahwa semakin kecil perubahan piutang usaha maka semakin kecil nilai total akrual. Dengan demikian, semakin besar skala usaha perusahaan, yang ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan, kecilnya perubahan piutang usaha dan besarnya aktiva tetap, maka nilai total akrual akan semakin rendah.

Model modifikasi Jones yang didapatkan pada persamaan di atas digunakan sebagai dasar untuk memisahkan tingkat akrual yang normal dan tidak normal. Tingkat akrual yang tidak normal atau *discretionary accruals* merupakan nilai residual dari persamaan di atas. Dengan demikian, besarnya *discretionary accruals* dihitung dengan menggunakan persamaan berikut ini.

Sektor non manufaktur:

$$\frac{DA_{it}}{A_{it-1}} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - \left[0,030 - 0,114 \frac{(dRev - dRec)_{it}}{A_{it-1}} - 0,070 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right]$$

Sektor manufaktur:

$$\frac{DA_{it}}{A_{it-1}} = \frac{TA_{it}}{A_{it-1}} - \left[0,047 - 0,062 \frac{(dRev - dRec)_{it}}{A_{it-1}} - 0,082 \frac{PPE_{it}}{A_{it-1}} \right]$$

Setelah nilai *discretionary accruals* diperoleh bagi setiap perusahaan selama periode pengamatan, kemudian dilakukan pengujian korelasi atau pengaruh antara *discretionary accruals* dengan status terlambat atau tidaknya perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan. Selain pengujian terhadap korelasi atau pengaruh *discretionary accruals* dengan status perusahaan juga dilakukan pengujian korelasi atau pengaruh *discretionary accruals* dengan faktor-faktor lainnya, yaitu tingkat hutang perusahaan, skala usaha perusahaan, komite audit, komisaris independen dan kualitas audit. Berikut ini disajikan hasil pengujian *discretionary accruals*.

Tabel 4: Model *Discretionary Accruals*

	Expected Sign	Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Keterangan
		B	Std. Error			
Constant		-0.277	0.071	-3.886	0	
Status	+	0.036	0.016	2.237	0.026	Signifikan
LnAssets	+/-	0.024	0.005	4.468	0	Signifikan
Leverage	+/-	-0.031	0.012	-2.66	0.008	Signifikan
KOMAUD	-	-0.049	0.017	-2.79	0.006	Signifikan
KOMIND	-	0.056	0.055	1.027	0.305	Tidak Signifikan
Auditor	-	-0.032	0.017	-1.946	0.052	Signifikan

R-squared 0.089 F 6.039

Adj R-squared 0.074 Sig. 0.000

Durbin-Watson 1.934

Berdasarkan hasil regresi multivariabel yang ditampilkan pada Tabel 4 maka dapat diambil kesimpulan bahwa perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan memiliki rata-rata *discretionary accruals* lebih besar daripada perusahaan yang tidak terlambat. Koefisien pada variabel "Status" menunjukkan bahwa perusahaan yang terlambat menunjukkan rata-rata *discretionary accruals* lebih besar 3,6% dari total aktiva periode sebelumnya (t-1) dibandingkan perusahaan yang tidak terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan.

Statistik deskriptif menyajikan bahwa rata-rata perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan secara umum memiliki rata-rata performa keuangan buruk. Dengan *discretionary accruals* yang tinggi, perusahaan terlambat tersebut berupaya menunjukkan performa keuangan yang bagus kepada *stakeholder*. Hasil ini sesuai dengan Chung et al. (2003) bahwa perusahaan publik yang secara sengaja menunda pengumuman laba ke publik dengan mengumumkan laba di WSJ setelah SEC *filing* menunjukkan akrual yang meningkatkan laba. Hasil ini juga konsisten dengan dugaan bahwa perusahaan menunda pengumuman laba untuk menanggukkan pengumuman berita buruk (Bowen et al 1992; Patell dan Wolfson 1982; Trueman 1990) dalam Chung et al. (2003). Chung et al (2003) menemukan bahwa perusahaan yang sengaja menunda

pengumuman labanya memiliki *return on assets* yang lebih rendah dan rasio *leverage* yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlambat dalam mengumumkan labanya. Sedangkan dalam penelitian ini, perusahaan terlambat memiliki arus kas operasi, perubahan pendapatan dan ekuitas yang lebih rendah serta rasio *leverage* yang lebih tinggi daripada perusahaan yang tidak terlambat.

Skala usaha perusahaan, bersama-sama dengan faktor lain, memiliki pengaruh positif terhadap tingkat manajemen laba. Hasil regresi ini mendukung hipotesis H_{22} bahwa setiap perubahan total aktiva sebesar 1% maka *discretionary accruals* akan berubah sebesar 2,4%. Hal konsisten dengan Nelson et al. (2002) dalam Kim et al. (2003) bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar *bargaining power* perusahaan kepada auditor. Dengan demikian auditor cenderung melonggarkan perusahaan besar yang melakukan manajemen laba.

Rasio *leverage*, bersama-sama dengan faktor lainnya, memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat manajemen laba. Hasil regresi multivariabel menunjukkan bahwa setiap perubahan 1% *leverage* maka *discretionary accruals* akan berubah sebesar 3,1%. Tabel 6 menyajikan nilai t-statistik sebesar -2,660 yang lebih kecil dari t-tabel sebesar -1,96. Maka H_0 ditolak, sehingga hipotesis alternatif H_{a3} tidak ditolak. Hasil ini konsisten dengan De Angelo et al. (1994) dimana perusahaan yang mengalami tekanan keuangan kemungkinan melakukan *income-decreasing accruals* agar dapat melakukan renegotiasi kontrak utang.

Uji regresi multivariabel antara Komite Audit dengan *discretionary accruals* menunjukkan hubungan negatif dengan tingkat signifikansi 0,006 (lebih kecil dari $\alpha = 0,05$). Tanda koefisien hasil regresi multivariabel menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki komite audit sesuai dengan ketentuan Bapepam memiliki *discretionary accrual* lebih rendah jika dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki komite audit tetapi belum sesuai ketentuan atau bahkan yang tidak memiliki komite audit. Hasil penelitian ini konsisten dengan Chtourou et al. (2001) bahwa komite audit memiliki hubungan negatif dengan manajemen laba. Persentase perusahaan publik yang memiliki Komite Audit sesuai dengan ketentuan Bapepam sebanyak 73,7% sedangkan yang tidak sesuai atau belum memiliki Komite Audit sebesar 26,3%. Dengan demikian, mayoritas perusahaan yang dijadikan sampel pada periode penelitian memiliki Komite Audit yang sesuai dengan ketentuan Bapepam.

Uji regresi multivariabel antara Komisaris Independen dan *discretionary accruals* menunjukkan hubungan positif dan tidak signifikan. Arah hubungan ini tidak sesuai dengan prediksi teori bahwa adanya Komisaris Independen mampu memperlemah tingkat *discretionary accruals*. Dengan demikian, hipotesis alternatif H_{25} ditolak. Dari 380 observasi, sebanyak 12 perusahaan yang belum mengangkat Komisaris Independen atau sebesar 3,16%. Sedangkan sisanya telah memenuhi ketentuan BEJ untuk mengangkat Komisaris Independen.

Lebih lanjut, dari 380 observasi, sebanyak 88,9% perusahaan telah mengangkat Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan jumlah minimum yang ditetapkan BEJ.

Sedangkan yang belum memenuhi ketentuan atau yang tidak memiliki Komisaris Independen adalah sebanyak 11,1%. Dengan demikian, mayoritas perusahaan yang dijadikan sampel pada periode penelitian telah memenuhi persyaratan yang ditentukan BEJ.

Arah koefisien yang tidak sesuai prediksi teori dan tidak signifikan menunjukkan tidak efektifnya fungsi monitoring Komisaris Independen dalam mengurangi tingkat *discretionary accruals*. Hal ini kemungkinan disebabkan belum berjalannya fungsi pengawasan komisaris independen terhadap dewan direksi. Kemudian, dapat juga komisaris independen tersebut masih belum dapat menunjukkan independensinya. Kemungkinan penyebab lainnya adalah kurangnya kompetensi komisaris independen dalam proses operasi perusahaan atau tentang proses pelaporan keuangan. Terakhir, dari 380 observasi, dewan komisaris yang berjumlah lebih dari 5 (lima) orang hanya sebanyak 74 observasi atau sekitar 19%. Selebihnya di bawah 5 (lima) orang, dimana pada perusahaan tersebut rata-rata hanya memiliki 1 (satu) atau 2 (dua) orang anggota komisaris independen. Fenomena ini dapat memungkinkan masih lemahnya peranan pengawasan komisaris independen.

Konsisten dengan Becker et al. (1998), hasil penelitian ini mendukung hipotesis H_{2c} dimana perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 mampu menekan tingkat manajemen laba. Hasil regresi multivariabel antara auditor dengan *discretionary accruals* menunjukkan bahwa perusahaan publik yang diaudit oleh KAP Big 5 memiliki rata-rata *discretionary accruals* yang lebih rendah 3,2% dari total aktiva periode sebelumnya dibandingkan dengan rata-rata *discretionary accruals* perusahaan publik yang diaudit oleh KAP Non Big 5.

Frekuensi perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 adalah sebesar 66,6% sedangkan yang diaudit oleh KAP Non Big 5 adalah sebesar 33,4%. Banyaknya perusahaan yang diaudit oleh auditor dari KAP Big 5 menunjukkan fenomena bahwa perusahaan-perusahaan publik di Indonesia berupaya untuk mengurangi keleluasaan manajemen dalam melaporkan kondisi keuangannya. Konsisten dengan penelitian-penelitian sebelumnya, perusahaan yang diaudit oleh auditor KAP Big 5 cenderung melaporkan tingkat *discretionary accruals* yang lebih rendah dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 5 (Becker et al, 1998). Gore et al. (2001) dalam Kim et al. (2003) melaporkan bahwa auditor KAP Non Big 5 memperkenankan mempunyai rata-rata *discretionary accruals* yang lebih besar daripada auditor Big 5.

VII. KESIMPULAN

A. IMPLIKASI MANAJERIAL

Berdasarkan statistik deskriptif, perusahaan publik yang terlambat menyampaikan laporan keuangan tahunan secara rata-rata memiliki kinerja keuangan yang buruk. Arus kas operasi, ekuitas, dan perubahan pendapatan perusahaan yang terlambat secara rata-rata lebih rendah daripada perusahaan yang tidak terlambat. Tingkat hutang yang diproksi

dengan *leverage* untuk perusahaan yang terlambat secara rata-rata lebih tinggi daripada perusahaan tidak terlambat.]

Keterlambatan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya menjadi pertanyaan penulis apakah terdapat motivasi tertentu yang mendasari keterlambatan tersebut. Bowen et al. (1992), Patell dan Wolfson (1982), dan Trueman (1990) menyatakan bahwa perusahaan yang menunda pengumuman labanya memiliki insentif untuk menunda berita-berita buruk. Beberapa indikator kinerja keuangan menunjukkan bahwa perusahaan yang terlambat memiliki kinerja yang buruk. Manajer dari perusahaan yang terlambat memiliki insentif untuk menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan memilih kebijakan akrual yang dapat meningkatkan laba.

Faktor ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat *discretionary accruals* bersama-sama dengan faktor lainnya. Sesuai dengan penelitian Barton dan Simko (2002) bahwa perusahaan yang berskala besar cenderung memiliki tekanan untuk memenuhi harapan analis. Lebih lanjut, perusahaan berskala besar memiliki posisi tawar lebih besar dengan auditor untuk melakukan negosiasi. Nelson et al. (2002) membuktikan bahwa auditor cenderung melonggarkan perusahaan berskala besar yang melakukan manajemen laba. Kekuatan manajemen perusahaan berskala besar cenderung lebih besar. Meskipun perusahaan memiliki sistem pengendalian internal yang kuat, manajemen masih mungkin melanggar sistem pengendalian internal untuk memanipulasi laba dengan tujuan pencapaian *threshold* laba (Kim et al. 2003).

Faktor tingkat hutang memiliki pengaruh negatif terhadap *discretionary accruals*. Rata-rata *leverage* seluruh sampel yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar emiten BEJ menghadapi tekanan keuangan. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi manajer perusahaan yang memiliki rasio tingkat hutang di atas rata-rata melakukan manajemen laba yang menurunkan laba untuk dapat melakukan renegosiasi hutang.

Faktor komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *discretionary accruals*. Peran utama komite audit adalah membantu memastikan kualitas pelaporan keuangan, sebagaimana yang disebutkan oleh BRC (1999) "*the audit committee is the ultimate monitor of the financial reporting process*". Komite audit dapat mengurangi perilaku manajemen laba dengan mengevaluasi kompetensi serta independensi dari auditor eksternal atau dengan berdiskusi secara aktif dengan manajemen perusahaan dan auditor eksternal berkaitan dengan pertimbangan-pertimbangan akuntansi (Herdman 2002). Komite audit perusahaan publik yang menjalankan peran sebagaimana mestinya dapat membatasi perilaku manajer terkait dengan kualitas laporan keuangan.

Faktor kualitas audit diukur berdasarkan pembagian KAP Big 5 dan KAP Non Big 5. Perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 memiliki rata-rata *discretionary accruals* yang lebih kecil dibandingkan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big 5. Hal ini memiliki implikasi bahwa KAP Big 5 dapat mengurangi tingkat *discretionary accruals* yang dilakukan manajer perusahaan. KAP Big 5 cenderung melakukan audit secara konservatif.

Konservatisme KAP Big 5 ini dilakukan untuk menjaga reputasinya dari risiko litigasi yang timbul karena adanya informasi menyesatkan dalam laporan keuangan atau laporan keuangan terlalu optimis (Francis et al. 2004).

Secara keseluruhan, ketepatan waktu perusahaan publik dalam menyampaikan laporan keuangannya sangat diperlukan oleh para pemakai laporan keuangan. Informasi keuangan yang terkandung di dalamnya diperlukan untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang terjadi dalam perusahaan yang mungkin dapat mempengaruhi pemakai informasi dalam membuat prediksi dan keputusan (Hendriksen 1982) dalam Bandi (2000). Implikasinya, laporan keuangan perusahaan publik seharusnya disampaikan kepada otoritas pasar modal dalam suatu interval waktu yang telah ditentukan agar informasi tersebut berguna bagi pemakai, khususnya investor.

Perusahaan yang terlambat dalam menyampaikan laporan keuangan tahunannya diduga melakukan manajemen laba yang diproksi dengan *discretionary accruals*. Kebijakan akrual yang meningkatkan laba dilakukan manajer perusahaan dapat disebabkan oleh insentif untuk mencapai target laba yang ditentukan sebelumnya, jika laba sebelum di-*manage* tidak dapat mencapai target laba tersebut. Insentif lainnya adalah manajer ingin menunjukkan bahwa laba pada tahun berjalan lebih baik dari laba pada tahun-tahun sebelumnya. Manajer perusahaan memilih untuk menggunakan kebijakan akrual untuk *manage* laba karena pihak luar perusahaan sulit untuk mendeteksi manajemen laba yang dilakukan manajer dengan keterbatasan atau ketidaktersedianya informasi.

B. KETERBATASAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Beberapa keterbatasan tersebut adalah sebagai berikut:

- Jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian ini relatif kecil dibandingkan penelitian terdahulu (Chung et al. 2003) yang menggunakan hingga ribuan observasi.
- Chung et al. (2003) menguji hubungan keterlambatan pengumuman laba perusahaan publik dengan *discretionary accruals* menggunakan pengumuman laba kuartalan, sedangkan penelitian ini hanya menggunakan data pengumuman laba tahunan. Penggunaan data kuartalan memberikan fokus pada kejadian yang lebih tajam, sehingga dapat memperkuat hasil pengujian terhadap pendeteksian manajemen laba.
- Variabel komisaris independen yang digunakan dalam penelitian ini hanya bersifat fisik saja, yaitu prosentase komisaris independen dalam struktur dewan komisaris perusahaan. Penelitian ini mengabaikan aspek-aspek penting lainnya dalam penilaian efektifitas peranan fungsi komisaris independen dalam mengurangi tingkat *discretionary accruals* seperti yang digunakan dalam penelitian di luar negeri. Aspek-aspek lain tersebut misalnya, kompetensi komisaris independen tentang perusahaan serta pengetahuan mengenai proses pelaporan keuangan perusahaan.

- Pengujian terhadap kualitas audit hanya menggunakan KAP Big 5/Non Big 5, tetapi tidak memperhatikan banyaknya kontrak penugasan audit yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

C. SARAN

Untuk mengatasi keterbatasan dari penelitian ini, maka penelitian selanjutnya diharapkan:

- Menambah periode pengamatan atau jumlah observasi agar mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih akurat.
- Menambah beberapa variabel yang lebih spesifik tentang komisaris independen dan komite audit, misalnya kompetensi dan aktivitasnya.
- Pengujian dapat diperluas dengan mengeksplorasi apakah kebijakan akrual yang dilakukan perusahaan terlambat dan tidak terlambat berbeda untuk masing-masing variabel penelitian.

Bagi pengguna laporan keuangan diharapkan lebih berhati-hati dalam menggunakan laporan keuangan karena adanya indikasi praktik manajemen laba, terutama bagi perusahaan yang terlambat menyampaikan laporan keuangan. Bagi regulator diharapkan memberikan sanksi yang tegas, misalnya *delisting* bagi perusahaan yang berkali-kali terlambat. Sanksi yang ada saat ini (yaitu denda administratif) dirasakan tidak memberatkan perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pengawas Pasar Modal. 1997. Himpunan Peraturan Pasar Modal Indonesia. Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Bandi. 2000. Ketepatan Waktu Atas Laporan Keuangan Perusahaan Indonesia. *Symposium Nasional Akuntansi III*.
- Chai, M. L. dan S. Tung. 2002. The Effect of Earnings-Announcement Timing on Earnings Management. *Journal of Business Finance & Accounting* 29(9) & (10).
- Chung, K.H, R.A. Jacob, dan Ya B. Tang. 2003. Earnings Management by Firms Announcing Earnings after SEC Filing. *Atlantic Economic Society*.
- Chtourou, S.M., J. Bédard, dan L. Courteau. 2001. Corporate Governance and Earnings Management. *Fsegs, SFAX, Tunisia, Université Laval, Canada*.

- _____.2002. The Effect of Audit Committee Independence, Competence, and Activity on Aggressive Earnings Management. *Fsegs, SFAX, Tunisia, Université Laval, Canada*.
- DeAngelo, H., L. DeAngelo, dan D. Skinner.1994. Accounting Choice in *Troubled Companies*. *Journal of Accounting and Economics* (17):113-144.
- _____.1988. Managerial Competition, Information Costs, and Corporate Governance: The Use of Accounting Performance Measures In Proxy Contests. *Journal of Accounting and Economics* (10):3-36.
- Diantimala, Y dan J. Hartono.2001. Pengaruh Pengumuman Laba Terhadap Asimetri Informasi. *Simposium Nasional Akuntansi IV*.
- Djakman, C. D. 2003. Manajemen Laba dan Pengaruh Kebijakan Multipapan Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VI*.
- _____. 2005. Manajemen Laba dan Perusahaan yang Memenuhi Kriteria Delisting. Disertasi. Program Studi Ilmu Manajemen. Universitas Indonesia.,Depok
- Gumanti, T. A.2000. Earnings Management Dalam Penawaran Saham Perdana Di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi III*.
- _____.2000. Earnings Management: Suatu Telaah Pustaka. *Jurnal Akuntansi & Keuangan* (2): 104-115.
- Healy, P.M. dan J. M. Wahlen.1999. A Review of the Earnings Management Literature and Its Implications for Standard Setting. *Accounting Horizons*(13): 365-383.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2002. Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta:Penerbit Salemba Empat
- Jensen, M. C. dan W.H. Meckling. 1976. Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics* (3): 305-360.
- Kim, Y., C. Liu dan S. G. Rhee. 2003. The Relation of Earnings Management to Firm Size. *College of Business Administration, University of Hawaii*.

- Mansyur. 2002. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterlambatan Penyampaian Laporan Keuangan Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta*. Tesis. Universitas Indonesia, Depok
- Parulian, S. R. 2004. *Peranan Komite Audit dan Komisaris Independen Dalam Mengendalikan Praktek Manajemen Laba: Studi Empiris Perusahaan di Bursa Efek Jakarta*. Thesis. Universitas Indonesia, Depok
- Peasnell, K., P. Pope, dan S. Young, 2001. Board Monitoring & Earnings Management: Do outside Directors Influence Abnormal Accruals? Working Paper. *Lancaster University Management School, UK*.
- Scott, W.R. 2000. *Financial Accounting Theory*. Ontario: Prentice Hall Canada Inc.
- Sulistiyanto, S. 2003. Good Corporate Governance: Berhasilan Diterapkan di Indonesia? *Jurnal Widya Warta (2)*
- Tjager, I N., F. A. Alijoyo, H.R. Djemat, dan B. Soembodo. 2003. *Corporate Governance, Tantangan dan Kesempatan bagi Komunitas Bisnis Indonesia*. Jakarta: PT Prenhallindo
- Watts, Ross L. dan J. L. Zimmerman. 1986. *Positive Accounting Theory*. New Jersey: Prentice-Hall